

RENCANA KERJA (RENJA)

1 Juli 2021
Aca
Lodovikus L. Wungu

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2022



Alamat :
Jln. Basuki Rahmat Telp. (0383) 21056
LARANTUKA
Kode Pos 86218

Flores Timur, 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia, maka penyusunan rencana kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan rencana kerja Tahun 2022 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam menyusun Rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENJA BPPPPD) merupakan dokumen rencana kerja resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Selain itu Renja tahun 2022 merupakan renja tahun terakhir dalam periode RPJMD 2017-2022.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPPPD Kabupaten Flores Timur pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini guna membantu meningkatkan kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur di masa mendatang sangat kami harapkan.

Larantuka, Juli 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Apolonia Corebima, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196907181997032002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	3
1.4	Sistematika Penyusunan.....	3
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020	
2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra.....	5
2.2	Analisis kinerja pelayanan.....	13
2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi.....	16
2.4	Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022.....	17
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	
3.1	Telaah terhadap kebijakan nasional.....	26
3.2	Tujuan dan sasaran Renja.....	27
3.3	Program dan Kegiatan.....	31
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	32
BAB V	PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	6
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022.....	18
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD BPPPD.....	28
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan Renja Tahun 2022.....	32

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Selain itu terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari *system top-down* (dari atas ke bawah) menjadi *bottom-up* (dari bawah ke atas) tentu turut mempengaruhi dokumen perencanaan yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan, *stakeholder* lain dan masyarakat. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah.

Rencana kerja tahunan organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa dalam menyusun rencana pembangunan daerah, harus memperhatikan 9 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum : mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara : menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum : mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif,
4. Asas Keterbukaan : membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan

rahasia Negara;

5. Asas Proporsionantas : mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas : mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
7. Asas Akuntabilitas : setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
8. Asas Efisiensi : memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan;
9. Asas Efektifitas : mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Begitu pula Renja BPPPPD merupakan penjabaran dari Renstra BPPPPD dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja BPPPPD sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Organisasi Perangkat Daerah).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur;
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sedangkan tujuannya adalah mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penyusunan

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra

2.2 Analisis kinerja pelayanan

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi.

Pada tahun 2019 ada 12 Program dan 36 kegiatan dengan tingkat realisasi mencapai 92,14 % sesuai rencana sebagai upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2020 BPPPPD melaksanakan 12 program dan 32 kegiatan dengan tingkat realisasi 88,17%. Kondisi ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19 sehingga sebagian besar realisasi kinerja dan keuangan tidak maksimal. Hasil Pelaksanaan Renja tahun 2019 dan tahun 2020 serta tingkat capaian renstra dapat dicermati pada Tabel 2.1 berikut ini.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah n-3(2019)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2020)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/4)
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan									
	Bidang Urusan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah			39,27 %			88.17			71.88
4.03.0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	53,37 %	100%	85,97 %	85.97 %	100		82.20

4.03.0101.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	4375	970	880	155	17.61	1000	2125	48.57
4.03.0101.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	24	12	12	100	12	48	80.00
4.03.0101.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dilayani (unit)	18	18	18	18	100	18	18	100.00
4.03.0101.01.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	60	24	12	12	100	12	48	80.00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan (jenis)	140	50	30	30	100	35	115	82.14
4.03.4.03.0101.01.08	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	160	62	30	30	100	36	128	80.00
4.03.4.03.0101.01.10	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (buku)	7882	3150	2100	2100	100	1,800	7050	89.44
4.03.4.03.0101.01.11	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (komponen)	3komponen pertahun	3	8	8	100	3	14	93.33
4.03.4.03.0101.01.12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (exemplar)	3857	1580	830	298	35.90361446	920	2798	72.54
4.03.4.03.0101.01.15	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum (dos)	13071	5250	2850	2850	100	3,000	11100	84.92
4.03.4.03.0101.01.17	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	275	145	36	30	83.33333333	60	235	85.45
4.03.4.03.0101.01.18	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknik Perkantoran	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	20	18	19	18	94.73684211	19	18	90.00

4.03.4.03.0101.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	61,48 %	100%	100%	100	100	101	92.18
4.03.4.03.0101.02.05	Kegiatan pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 unit						0	
4.03.4.03.0101.02.07	Kegiatan Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman	Terlaksananya Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman	1 Paket	1 paket					1	50.00
4.03.4.03.0101.02.09	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional(unit)	7 Unit Kendaraan Roda 2					4	4	57.14
4.03.4.03.0101.02.22	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	3 Jenis = 10 unit AC, 1 paket kain gorden, 1 unit genset	1 jenis (65 lembar gorden)				5	6 jenis	50.00
4.03.4.03.0101.02.24	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit)	28 unit (11 laptop, 4 komputer, 9 printer, 1 unit mesin fotocopy mini, 2 unit mesin pemotong rumput, 1 unit soundsystem)	18 unit (9 unit laptop, 2 unit PC, 6 unit printer, 1 unit scanner))				10	28 unit	100.00
4.03.4.03.0101.02.26	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang diadakan	151 unit (21 meja, 17 kursi, 2 unit bangku panjang, 2 set sofa, 7 unit lemari arsip, 1 rak kayu, 1 unit meja biro)	8 unit (3 buah meja rapat, 5 buah kursi)	77	77	100		8 unit (3 buah meja rapat, 5 buah kursi)	5.30
4.03.4.03.0101.02.28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor tang dipelihara (unit)	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor untuk 60 bulan	1	1	100	1	1	100.00
	Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	18 unit = roda 4 (2 unit), roda 2 (16 unit)	18 unit = roda 4 (2 unit), roda 2 (16 unit)	18	18	100	18	18	100.00

	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)	22 unit = 20 AC, 2 generator	20	12	12	100	22	22	100.00
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	74 unit = 41 laptop & komputer, 33 printer	44	26	26	100	74	74	100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	24 orang	4 orang				5	5	37.50
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek (orang)	24 orang	4				5	9	37.50
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	30	12	6	6	100	6		80.00
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan, dan Laporan Tahunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD (dokumen)	6 Dokumen per tahun	12	6	6	100	6	24	80.00
	Program Pengembangan Data / Informasi	Jumlah dokumen data dan informasi	5	2	1	1	87.5	1	4	80.00
	Kegiatan Penyusunan Profile Daerah	Jumlah Buku profil (buku)	5 Dokumen	2	1	1	100	1	4	80.00
	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah bulan pengelolaan SIPD pembangunan daerah secara online (bulan)	60 Bulan	24	12	9	75	12	45	61.67
	Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Data/Informasi Geospasial	Tersedianya data/informasi geospasial dan koordinasi pemetaan (bulan)	60 Bulan	12					12	20.00
	Program Kerjasama Pembangunan	Rasio LSM/NGO yang aktif bekerja sama	16 LSM/NGO	11	13	11	84.62	14	14	87.50
	Kegiatan Koordinasi kerjasama kemitraan dengan LSM/NGO	Jumlah kerjasama dengan dunia usaha/ Lembaga (LSM/NGO)	16 LSM/NGO	11	13	11	84.62	14	14	87.50

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/pelatihan Perencanaan	<i>500 orang</i>	<i>200 orang</i>	100	100	100	100	80	80.00
Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	<i>Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah (orang)</i>	500	200	100	100	100	100	400	80.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah	<i>57.00</i>	<i>18</i>			100		0	88.00
Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD	<i>Jumlah dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rancangan awal RKPD tahunan n+1 (dokumen)</i>	15	6	3	3	100	3	12	80.00
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	<i>Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)</i>	1000	400	200	200	100	200	800	80.00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	<i>Jumlah dokumen laporan Monev DAK, Dekon dan TP monitoring dan evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (dokumen)</i>	10	4	2	2	100	2	8	80.00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah	<i>Jumlah dokumen evaluasi RKPD (dokumen)</i>	10	4	2	2	100	2	8	80.00
Evaluasi Midterm RPJMD	Jumlah dokumen Evaluasi Midterm (dokumen)	1						0	
Evaluasi RPJPD	Jumlah dokumen evaluasi RPJPD (dokumen)							0	0.00
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS, dan KUA&PPAS Perubahan (dokumen)	20	2					2	20.00
Penyusunan Perda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu	Jumlah Perda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (dokumen)	<i>1 perda</i>					1	1	100.00

	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	- Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) (Dokumen)	5 Dokumen	2				1	3	
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	30	10	1	1	100	3	14	53.33
	Koordinasi Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (dokumen)	5	2					2	40.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah Bawah	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)</i>	20	8	1	1	100	3	12	60.00
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (dokumen)	5						0	
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya	25	10 dokumen	5	5	100	4	19	76.00
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)</i>	20	8	4	4	100	3	15	75.00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program - Program Penanggulangan kemiskinan	<i>Jumlah laporan perencanaan penanggulangan kemiskinan (dokumen)</i>	5	2	1	1	100	1	4	80.00
	Program perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (dokumen)	40	12	2	4	200	7	23	57.50
	Koordinasi perencanaan Infrastruktur Daerah	<i>Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)</i>	20	8	1	3	300	1	10	25.00
	Koordinasi perencanaan Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Perumahan (dokumen)	5	1					1	40.00

	Koordinasi perencanaan Air minum dan Sanitasi	Jumlah dokumen air minum dan sanitasi (dokumen)	5	2	1	1	100	6	9	90.00
	Koordinasi perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan wilayah (dokumen)	5	1					1	40.00
	Program, Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup dan Pemerintahan	Jumlah Penelitian yang di kembangkan sesuai dengan 6 tema	20	1			0	2	3	15.00
	Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen)	1 Dokumen pertahun	1			0	1	2	40.00
	Penelitian Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen)--> DikBud	1 Dokumen pertahun					1	1	20.00
	Penelitian Pengembangan Bidang Iptek	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang IPTEK (dokumen)	1 Dokumen pertahun						0	0.00
	Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang Lingkungan Hidup (dokumen)	1 Dokumen pertahun						0	0.00
	Penelitian Pengembangan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang Pemerintahan (dokumen)	1 Dokumen pertahun						0	0.00
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah tenaga peneliti dan 6 tema hasil penelitian yang dipublikasikan	9	1			0	2	3	33.33
	Peningkatan kapasitas kelembagaan litbang daerah	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah (Orang/dokumen)	1 Dokumen per tahun	1	1 paket		0	2	3	75.00
	Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah penelitian yang di publikasikan (dokumen)	1 Dokumen pertahun						0	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2020

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, maka tugas BPPPPD sebagai perencana pembangunan daerah yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
3. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. RPJP daerah dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut maka Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan RPJMD 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel. 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Flores Timur**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penunjang Urusan												
1	Perencanaan Pembangunan											
1:01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	ada	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	Dokumen RPJPD sudah tersedia dan masih berlaku
1:02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	ada	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	Dokumen RPJMD sudah tersedia dan masih berlaku
1:03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	RKPD dihasilkan setiap tahun
1:04	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	ada	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	Dokumen RTRW sudah tersedia dan masih berlaku
1:05	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100	100	100	100	100	100	90,64	100	100	Program dalam RPJMD sebanyak 171 dan dalam RKPD sebanyak

													155 program
1:06	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		136	100	100	100	100	95	88,39	100	100		Program dalam RKPD sebanyak 155 dan dalam APBD sebanyak 137 program
4	Penelitian dan Pengembangan												
4:01	Persentase implementasi rencana kelitbangan.		80	80	80	100	100	40		40	100	100	Penelitian dan pengembangan hanya terlaksana 1 kali pada tahun 2019. Tahun 2020 direncanakan namun tidak terealisasi.
4:02	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.		50	100	100	100	100	100			100	100	
	Penerapan SIDA												
4:03	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.		10	20	50	60	75	16.67			60	75	
4:04	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.		10	50	50	100	100	1 kebijakan			100	100	

Dari table 2.2 dapat diketahui bahwa untuk penunjang urusan perencanaan pembangunan, ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RTRW pada indicator kinerja tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak ada, karena dokumen tersebut telah tersedia pada tahun sebelumnya. Dengan demikian dokumen tersebut sudah ada, dan masih berlaku selama tahun 2018-2022. Selain ketersediaan dokumen perencanaan, penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD maupun konsistensi penjabaran RKPD ke APBD Tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya kebijakan-kebijakan anggaran yang berkaitan dengan adanya pandemic covid-19 yang turut mempengaruhi proses penganggaran.

Selain urusan perencanaan, BPPPPD juga melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan daerah. Untuk tahun 2020, BPPPPD tidak menyelenggarakan kegiatan penelitian karena mengalami refocusing, namun tetap melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Secara umum permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan upaya mengatasi antara lain :

1. Permasalahan:

- a. Ketidak konsistenan antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang termuat didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020
- b. Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara baik dan optimal
- c. Adanya pandemi covid-19 sehingga sebagian realisasi kinerja dan anggaran tidak maksimal

2. Upaya Mengatasi

- a. Membangun komitmen bersama agar selalu konsisten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang termuat didalam RKT
- b. Membangun koordinasi lintas sektor secara optimal
- c. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan metode lain misalnya *virtual meeting* atau metode lainnya, yang dapat mengoptimalkan realisasi kinerja dan anggaran.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah serta sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi dan Kabupaten.
- b. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian dan pengembangan
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
- e. Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- f. Pengelolaan administrasi Badan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Flores Timur yaitu '**Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata**' (Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022) maka BPPPPD Kabupaten Flores Timur bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Perencanaan ini dalam pelaksanaannya diawali dengan musrenbang, mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten, serta forum OPD untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan OPD dan antar OPD.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh OPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Renja OPD.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan anatar rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra perangkat daerah dengan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk

setiap perangkat daerah berdasarkan hasil konsultasi public.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2022 dilakukan dengan mengidentifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan BPPPPD sebagai bahan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, namun terdapat beberapa sub kegiatan dan jumlah anggaran yang berbeda antara rancangan awal RKPD dan rancangan akhir RKPD. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL EKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING						
	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	KODE											
	URUSAN	BIKANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN						SUB KEGIATAN	URUSAN	BIKANG	URUSAN	PROGRAM		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)
5																						
						Unsur Penunjang Urusan																
	5-1	5-4	0-	02	0			7.161.389,000					5									
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							5-1	5-4	0-0	02						
	x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.369,978,000												6.793,786,000		
	x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		3.369,978,000					x	xx						3.119,473,000		
													x	xx	01					3.119,473,000		
						- Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3.369,978,000														
						- Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100															
						- Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	5															
						- Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	6															
						- Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun (dokumen)	2															
						- Jumlah tenaga peneliti dan 6 tema hasil penelitian yang dipublikasikan (Orang)	2															
	x	xx	01		##	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		30,000,000					x	xx	01	2 01				30,000,000		
	x	xx	01		##	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD (dokumen)	8	30,000,000	Larantuka			x	xx	01	2 01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD (dokumen)	8	30,000,000	Larantuka
	x	xx	01		##	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,357,933,000					x	xx	01	2 02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,364,233,000
	x	xx	01		##	02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)	14	2,317,933,000	Larantuka			x	xx	01	2 02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)	14	2,317,933,000	Larantuka

NO	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	CATATAN PENTING
	URUTAN	REKAM	PROGRAM	SUB KEGIATAN						URUTAN	REKAM	PROGRAM	SUB KEGIATAN						
	X	XX	01	03	12	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	40,000,000	Larantuka	X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	12	46,300,000	Larantuka	
	X	XX	01	09	2	Jumlah Aparatur Lintang Daerah yang mengikuti Diklat (Orang)	112,000,000	Larantuka & Luar Daerah	X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Lintang Daerah yang mengikuti Diklat (Orang)	2	64,500,000	Larantuka & Luar Daerah	
	X	XX	01	02	2	Jumlah Aparatur yang mengikuti Blittek (orang)	32,000,000	Larantuka & Luar Daerah	X	XX	01	2.06	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Blittek (orang)	2	24,500,000	Larantuka & Luar Daerah	
	X	XX	01	01	3	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (komponen)	266,850,000	Larantuka	X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (komponen)	3	200,200,000	Larantuka	
	X	XX	01	02	4	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	6,000,000	Larantuka	X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	4	4,500,000	Larantuka	
	X	XX	01	04	4	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	17,500,000	Larantuka	X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	4	7,500,000	Larantuka	
	X	XX	01	04	4	Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan (jenis)	47,500,000	Larantuka	X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan (jenis)	35	37,500,000	Larantuka	
	X	XX	01	05	38	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	28,500,000	Larantuka	X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	38	4,200,000	Larantuka	
	X	XX	01	06	1800 buku, 75000 lembar	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (lembar)	35,000,000	Larantuka	X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (lembar)	50000	22,800,000	Larantuka	
	X	XX	01	06	2	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (jenis)	1,200,000	Larantuka	X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (jenis)	2	1,200,000	Larantuka	
	X	XX	01	08	500	Jumlah makan dan minum yang disediakan (porsi)	30,000,000	Larantuka	X	XX	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum yang disediakan (porsi)	500	30,000,000	Larantuka	
	X	XX	01	09	50	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	94,750,000	Larantuka dan Luar	X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	50	72,500,000	Larantuka dan Luar	
	X	XX	01	02	1	Tersedianya kendaraan dinas operasional (unit)	57,000,000	Larantuka	X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional (unit)	1	40,000,000	Larantuka	
	X	XX	01	01	130	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	365,440,000	Larantuka	X	XX	01	2.08	01	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	130	350,040,000	Larantuka	
	X	XX	01	02	12	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	1,750,000	Larantuka	X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	1,500,000	Larantuka	
	X	XX	01	04	18	Jumlah tenaga jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)	100,000,000	Larantuka	X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)	18	100,000,000	Larantuka	
	X	XX	01	04	18	Jumlah tenaga jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)	263,690,000	Larantuka	X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)	18	245,540,000	Larantuka	

NO	KODE					PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	KODE					PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	CATATAN PENTING							
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
x	xx	01	##			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			180,755,000		x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70,500,000									
x	xx	01	##	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dilayani jasa perizinan (unit)	18	5,500,000	Larantuka	x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dilayani jasa perizinan (unit)	18	10,500,000	Larantuka								
							Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	3	102,000,000	Larantuka							Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	3	17,500,000	Larantuka								
x	xx	01	##	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	32,000,000	Larantuka	x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	32,000,000	Larantuka								
x	xx	01	##	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	20	28,600,000	Larantuka	x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	20	5,500,000	Larantuka								
x	xx	01	##	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)	10	12,655,000	Larantuka	x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)	10	5,000,000	Larantuka								
5	01					Perencanaan																						
5	01	02				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah dokumen data dan informasi (dokumen)	1	3,041,411,000		5	01				Perencanaan				2,999,313,000								
							Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama (LSM/NGO)	14	1,871,361,000		5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah dokumen data dan informasi (dokumen)	1		1,890,963,000								
							Aparatur yang mengikuti Rakor Perencanaan (orang)	100									Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama (LSM/NGO)	14										
							- Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (dokumen)	3									Aparatur yang mengikuti Rakor Perencanaan (orang)	100										
							- Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	200										- Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (dokumen)	3									
5	01	02	2			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1,138,635,000		5	01	02	2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				925,635,000									
5	01	02	2	02		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah (orang)	100	53,805,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	5	01	02	2	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah (orang)	100	53,805,000	Larantuka, Kupang & Jakarta								
							- Jumlah Perda Perencanaan dan Penganggaran terpadu (PERDA)	1	110,480,000	Larantuka, Kupang & Jakarta							- Jumlah Perda Perencanaan dan Penganggaran terpadu (PERDA)	1	110,480,000	Larantuka, Kupang & Jakarta								

NO	KODE					PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	KODE					PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	CATATAN PENTING
	URUTAN	BIDANG	URUTAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN						URUTAN	BIDANG	URUTAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN						
							Jumlah event penilaian penghargaan pembangunan daerah yang diikuti (kali)	2	30,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta						Jumlah event penilaian penghargaan pembangunan daerah yang diikuti (kali)	2	55,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta		
5	01	02	2	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	200	248,700,000	Larantuka	5	01	02	2	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	200	210,700,000	Larantuka		
5	01	02	2	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan rancangan awal RKPD tahunan n-1 (dokumen)	3	495,650,000	Larantuka, Kupang	5	01	02	2	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan rancangan awal RKPD tahunan n-1 (dokumen)	3	495,650,000	Larantuka, Kupang		
						Jumlah dokumen rancangan RPJPD (dokumen)	1	200,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta												
5	01	02	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan			345,168,000		5	01	02	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan			395,070,000				
5	01	02	2	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bulan pengelolaan SIPD data pembangunan daerah secara online (bulan)	12	96,045,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	5	01	02	2	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bulan pengelolaan SIPD data pembangunan daerah secara online (bulan)	12	155,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta		
5	01	02	2	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	- Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) (Dokumen) - Jumlah bulan pengelolaan SIPD Perencanaan Daerah secara online (bulan)	1 12	158,550,000	Larantuka, Kupang, & Jakarta	5	01	02	2	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	- Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) (Dokumen) - Jumlah bulan pengelolaan SIPD Perencanaan Daerah secara online (bulan)	1 12	144,500,000	Larantuka, Kupang, & Jakarta		
5	01	02	2	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku profil(buku)	1	90,570,000	Larantuka	5	01	02	2	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku profil(buku)	1	95,570,000	Larantuka		
5	01	02	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			387,558,000		5	01	02	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			570,258,000			
5	01	02	2	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di	Jumlah dokumen evaluasi RKPD (dokumen)	2	172,258,000	Larantuka, Kupang	5	01	02	2	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi RKPD (dokumen)	4	172,258,000	Larantuka, Kupang		
															Jumlah dokumen evaluasi RPJPD (dokumen)	1	200,000,000	Larantuka, Kupang, & Jakarta			
5	01	02	2	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dunia usaha/Lembaga yang dilakukan kerja sama (LSM,NGO)	14	94,550,000	Larantuka	5	01	02	2	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dunia usaha/Lembaga yang dilakukan kerja sama (LSM,NGO)	14	87,500,000	Larantuka		
5	01	02	2	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Monev DAK, Dekon dan TP monitoring dan evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (dokumen)	2	120,750,000	Larantuka, Kupang, & Jakarta	5	01	02	2	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Monev DAK, Dekon dan TP monitoring dan evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (dokumen)	2	110,500,000	Larantuka, Kupang, & Jakarta		

NO	KODE					PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	KODE					PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								
5	01	03				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya (dokumen)	5	1,170,050,000		5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya (dokumen)	5	1,108,350,000				
							Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (dokumen)	6									Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (dokumen)	6					
							Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (dokumen)	2									Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (dokumen)	2					
5	01	03	2			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			475,000,000		5	01	03	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			431,000,000				
5	01	03	2	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->pemerintahan	2	127,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	5	01	03	2	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->pemerintahan	3	105,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta			
5	01	03	2	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->sosial budaya	2	127,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	5	01	03	2	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->sosial budaya	3	105,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta			
5	01	03	2	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan perencanaan penanggulangan kemiskinan (dokumen)	1	221,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	5	01	03	2	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan perencanaan penanggulangan kemiskinan (dokumen)	1	221,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta			
5	01	03	2			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			211,100,000		5	01	03	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			201,100,000				

URAIAN BIDANG URAIAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI	KODE					PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI	CATATAN PENTING
						URAIAN BIDANG URAIAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	URAIAN BIDANG URAIAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	URAIAN BIDANG URAIAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	URAIAN BIDANG URAIAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	URAIAN BIDANG URAIAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN						
5 01 03 2 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	2	105,550,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	5	01	03	2	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	2	100,550,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	
5 01 03 2 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi --> SDA (dokumen)	2	105,550,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	5	01	03	2	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi --> SDA (dokumen)	2	100,550,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	
5 01 03 2 03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			483,950,000		5	01	03	2	03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			476,250,000		
5 01 03 2 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)	1	108,250,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	5	01	03	2	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)	1	100,550,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	
5 01 03 2 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (Dokumen) Lanjutan PAMSIMAS III (Paket)	1	375,700,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	5	01	03	2	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (Dokumen) Lanjutan PAMSIMAS III (Paket)	1	375,700,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	
5 05	Penelitian dan Pengembangan			750,000,000		5	05				Penelitian dan Pengembangan			675,000,000		
5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dikembangkan sesuai dengan 5 tema (dokumen)	2	750,000,000		5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dikembangkan sesuai dengan 5 tema (dokumen)	2	675,000,000		
5 05 02 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen)		250,000,000		5	05	02	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen)		225,000,000		
5 05 02 2 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen)--> DikBud	1	250,000,000	Larantuka, Kupang	5	05	02	2	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen)--> DikBud	1	225,000,000	Larantuka, Kupang	
5 05 02 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen)		250,000,000		5	05	02	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen)		225,000,000		
5 05 02 2 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen) --> Pertanian	1	250,000,000	Larantuka, Kupang	5	05	02	2	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen) --> Pertanian	1	225,000,000	Larantuka, Kupang	
5 05 02 2	Pengembangan Inovasi dan			250,000,000		5	05	02	2		Pengembangan Inovasi dan			225,000,000		

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya pandemic covid-19 yang masih **berlangsung** mengakibatkan perlu adanya kebijakan-kebijakan strategis guna **penanggulangan** dan pemulihan dampak akibat covid-19, serta penyesuaian pagu indikatif **terhadap kondisi** keuangan dan pendapatan daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk tahun 2022 tidak ada usulan program **dan kegiatan** masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok **masyarakat** terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi **maupun dari** Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada BPPPPD **maupun** berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari pelaksanaan musrenbang **kabupaten/kota**. Dengan demikian tahun 2022, BPPPPD menjalankan program kegiatan **berdasarkan** hasil analisis kebutuhan dan evaluasi kinerja dari BPPPPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dirumuskan dalam tema: “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”. Tema tersebut dijalankan dalam tujuh prioritas yakni (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik.

Kebijakan nasional tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Ada tiga fokus dari pembangunan nasional tahun 2022 yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Flores Timur, yakni Transformasi Ekonomi, Pemulihan dan Perkuatan.

Selain ketiga fokus pembangunan tersebut, arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2022 adalah (1) Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19; (2) Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah; (3) Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah; dan (4) Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah yang dilaksanakan melalui dua strategi yakni (1) Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi; dan (2) Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana. Sasaran dari strategi tersebut adalah (1) Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah; (2) Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali; dan (3) Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Target yang ingin dicapai tahun 2022 dari sasaran tersebut untuk wilayah Nusa Tenggara Timur adalah: (1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,5%, tingkat kemiskinan 16,2%, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,4-4,1% .

Dengan demikian komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijumpai oleh sinergi pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

Dalam aspek perencanaan pun mengalami penyesuaian. RPJMD Kabupaten Flores Timur 2017-2022 menggunakan klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur program kegiatan yang

diatur dalam Permendagri No 13 tahun 2006. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk penginputan proses perencanaan berdasarkan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka penyusunan RKPD tahun 2022 tetap berpedoman pada RPJMD namun dilakukan pemutakhiran sesuai aturan berlaku. Dengan demikian kebijakan nasional ini juga berdampak pada penyusunan renja BPPPPD Tahun 2022 dimana melakukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPPPPD

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

BPPPPD Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan program dan kegiatan	% Capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya	85%	90%	95%	96%	97%	98%
	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di BPPPPD	% Penyerapan anggaran pada DPA BPPPPD mencapai pada setiap akhir tahun	85%	90%	95%	96%	97%	98%
Meningkatkan kapasitas SDM Perencana	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	% Aparatur Bappeda berpendidikan S1 dan S2	65%	70%	75%	80%	80%	80%
		Jumlah Aparatur BPPPPD mengikuti diklat perencanaan	4 orang	4orang	5 orang	6 orang	7orang	8orang
Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal	Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah	Tersedianya Perda Perencanaan dan Penganggaran	-	-	1 Perda	-	-	-
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain :						
		RPJPD	1 Dok	-	-	-	-	-
		RPJMD	1 Dok	-	-	-	-	-
		Renstra SKPD	30 dok	30 dok	-	-	-	-
	Renstra Kecamatan	19 dok	19 Dok	-	-	-	-	

		RKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		RKPD Perubahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Renja SKPD/Kecamatan	19 dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok
		Renja Perubahan SKP/Kecamatan	19 dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok
		KUA & PPAS	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
		KUA & PPAS Perubahan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas perencanaan pembangunan	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	% kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran, serta kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional	85%	85%	85%	85%	85%	85%
		Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang <i>up-to-date</i> dan akurat	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan	% keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab	75%	80%	85%	90%	95%	100%
	Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders	e- Planing	0	1 Sistem	-	-	-	-
		Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan money terintegrasi secara <i>on-line</i>	-	50%	55%	60%	65%	70%
Meningkatkan kerjasama kemitraan	Meningkatnya kerjasama kemitraan	Jumlah kerjasama LSM/NGO,PT, Lembaga Donor	10	11	12	13	14	15

Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah	Tersusnya dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan pembangunan	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan pembangunan selanjutnya, antara lain :						
		Evaluasi Program Pembangunan Tahunan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
		Evaluasi Midterm RPJMD	-	-	-	1 Dok	-	
		Evaluasi Akhir RPJMD	1 Dok	-	-	-	-	
Mewujudkan sebuah sistem penyusunan data dan evaluasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi	Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi						
		Buku Profil Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
		Perluasan Sample PDRB Flores Timur Dalam Angka						
		Kecamatan Dalam Angka						
		% Hasil penelitian/survey, kajian dan lain-lain	-	70%	75%	80%	85%	90%
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaag Penelitian dan Pengembangan daerah	Meningkatnyakapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah	% program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung prioritas pembangunan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, konservasi sumberdaya alam, meliputi :						
		% program prioritas yang dilaksanakan	50%	50%	60%	70%	80%	90%
		% Kegiatan prioritas yang dilaksanakan	50%	50%	60%	70%	80%	90%
		Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi SDA secara <i>up-to-date</i> dan akurat	10%	10%	20%	30%	40%	50%
		% Capaian kinerja SKPD dengan target Renstra dan RPJMD	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Meningkatkan capaian kinerja perencanaan pembangunan	Mendukung kontinuitas perencanaan pembangunan	% program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung prioritas pembangunan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, konservasi sumberdaya alam, meliputi :						
		% program prioritas yang dilaksanakan	50%	50%	60%	70%	80%	90%
		% Kegiatan prioritas yang dilaksanakan	50%	50%	60%	70%	80%	90%
		Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi SDA secara <i>up-to-date</i> dan akurat	10%	10%	20%	30%	40%	50%

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan rencana terakhir dalam periode RPJMD 2017-2022. **Rencana program** sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara mencapai tujuan. **Program-program** yang merupakan garis besar dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh **BPPPPD** selama satu tahun ke depan merupakan penerjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan dalam upaya reformasi birokrasi.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022 maka **rencana program** antara lain :

- 1. Program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program** Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3. Program** Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4. Program** Penelitian dan Pengembangan Daerah

dengan 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Sedangkan Rencana kerja dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Pada tahun anggaran 2022 ini terdapat 4 program, 16 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 6.793.786.000 dapat dilihat pada table 4.1.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
1					2	3	4	5	6	7	NASIONAL	DAERAH	8	9	10	11	12
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan												
5-1	5-4	0-0	02		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		6,793,786,000									4,812,170,300	
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		3,119,473,000									891,954,000	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	- Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3,119,473,000				pp	100	891,954,000			
						- Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100				
						- Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasltasnya (Orang)	5						5				
						- Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	6						6				
						- Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun (dokumen)	2						2				
						- Jumlah tenaga peneliti dan 6 tema hasil penelitian yang dipublikasikan (Orang)	1						1				
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30,000,000					PP		33,000,000			
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD (dokumen)	8	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			8	33,000,000			
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,364,233,000					PP		50,930,000			
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)	14	2,317,933,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14	2,549,726,300			
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	12	46,300,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	50,930,000			
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		64,500,000					PP		70,950,000			

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2023	PENGANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET			PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH				
X	XX	01	2.05	09	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
X	XX	01	2.06	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Libang Daerah yang mengikuti Diklat (Orang)	1	40,000,000	Larantuka & Luar Daerah	APBD II (DAU)	8	9	10	44,000,000		
X	XX	01	2.06	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek (orang)	2	24,500,000	Larantuka & Luar Daerah	APBD II (DAU)		PP	2	26,950,000		
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (komponen)	3	4,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	4,950,000		
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	4	7,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	12,500,000		
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	4	37,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	37,550,000		
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan (jenis)	35	4,200,000	Larantuka	APBD II (DAU)			35	4,620,000		
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	38	22,800,000	Larantuka	APBD II (DAU)			38	25,080,000		
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (lembar)	50000	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			68750	22,000,000		
X	XX	01	2.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (jenis)	2	1,200,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	1,320,000		
X	XX	01	2.06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah makan dan minum yang disediakan (orsi)	500	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3500	33,000,000		
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	50	72,500,000	Larantuka dan Luar Daerah	APBD II (DAU)			70	79,750,000		
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40,000,000				PP		44,000,000		
X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional (unit)	1	40,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	44,000,000		
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		350,040,000				PP		385,044,000		
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	130	1,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1000	1,650,000		
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	100,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	110,000,000		
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)	18	248,540,000	Larantuka	APBD II (DAU)			18	273,394,000		

ORGANISASI	INDUKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Secara)	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Secara)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PEMERINTAH DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF	
								NASIONAL	DAERAH				
5	5	5	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3			70,500,000								
	Jumlah kendaraan yang dilayani jasa perizinan (unit)			18	10,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)		PP	18	87,260,000		
	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)			3	17,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			18	11,550,000		
	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)			1	32,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)				19,250,000		
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)			20	5,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	35,200,000		
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)			10	5,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	12,500,000		
										11	8,760,000		
5	Perencanaan												
5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			1	2,999,313,000						3,177,716,300		
	Jumlah dokumen data dan Informasi (dokumen)			14	1,890,963,000				PU	1	1,958,531,300		
	Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama (LSM/NGO)			100						14			
	Aparatur yang mengikuti Rakor Perencanaan (orang)			3						100			
	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (dokumen)			200						3			
	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)									200			
5	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				925,635,000								
5	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			100	53,805,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)		PU	100	896,670,500		
	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah (orang)										59,185,500		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Setoran)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
						- Jumlah Perda Perencanaan dan Penganggaran terpadu (PERDA)	1	110,480,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)					
						Jumlah event penilaian penghargaan pembangunan daerah yang diikuti (kali)	2	55,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)					
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	200	210,700,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	60,500,000	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan rancangan awal RKPD tahunan n+1 (dokumen)	3	495,650,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			200	231,770,000	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			395,070,000					PU	434,577,000	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bulan pengelolaan SIPD data pembangunan daerah secara online (bulan)	12	155,000,000	Larantuka, Kupang, & Jakarta	APBD II (DAU)			12	170,500,000	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	- Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) (Dokumen)	1	144,500,000	Larantuka, Kupang, & Jakarta	APBD II (DAU)			1	158,950,000	
						- Jumlah bulan pengelolaan SIPD Perencanaan Daerah secara online (bulan)	12						12		
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku profil(buku)	1	95,570,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	105,127,000	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			570,258,000						627,283,800	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi RKPD (dokumen)	4	172,258,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			4	189,483,800	
						Jumlah dokumen evaluasi RPJPD (dokumen)	1	200,000,000	Larantuka, Kupang, & Jakarta	APBD II (DAU)			1	220,000,000	
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dunia usaha/Lembaga yang dilakukan kerja sama (LSM/NGO)	14	87,500,000	Larantuka				14	96,250,000	

URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	URURAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRIORITY		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp-)	LOKASI	SUMBER DANA
																									NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																				
5	01	02	2 01	01	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Money DAK, Dekon dan TP monitoring dan evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (dokumen)	2	110,500,000	Larantuka, Kupang, & Jakarta						2	121,550,000														
8	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya (dokumen)	5	1,108,350,000				PU	5	1,219,185,000																
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (dokumen)	6					6																		
						Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2					2																		
5	01	03	2 01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							PU			474,100,000															
5	01	03	2 01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->pemerintahan	3	105,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta					3	115,500,000															
5	01	03	2 01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->sosial budaya	3	105,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta					3	115,500,000															
5	01	03	2 01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan perencanaan pemanggulangan kemiskinan (dokumen)	1	221,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta				1	243,100,000																
8	01	03	2 02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			201,100,000					PU		221,200,000															
5	01	03	2 02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	3	100,550,000	Larantuka, Kupang & Jakarta					3	1,500,000															

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
1					2	3	4	5	6	7	NASIONAL	DAERAH	8	9	10	11	12
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi --> SDA (dokumen)	3	100,550,000	Larantuka, Kupang & Jakarta						3	110,605,000	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			476,250,000									
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)	3	100,550,000	Larantuka, Kupang & Jakarta			PU			3	110,605,000	523,875,000
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (Dokumen) Lanjutan PAMSIMAS III (Paket)	1	375,700,000	Larantuka, Kupang & Jakarta						1	413,270,000	
5	05				Penelitian dan Pengembangan												
5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang di kembangkan sesuai dengan 5 tema (dokumen)	2	675,000,000					PP		2	742,500,000	742,500,000
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen)		225,000,000					PP			247,500,000	
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen)--> DikBud	1	225,000,000	Larantuka, Kupang						1	247,500,000	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen)		225,000,000					PP			247,500,000	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen) --> Pertanian	1	225,000,000	Larantuka, Kupang						1	247,500,000	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			225,000,000					PP			247,500,000	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang IPTEK (dokumen)	1	225,000,000	Larantuka, Kupang							247,500,000	

BAB V
PENUTUP

Demikian rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan /program/kegiatan/sub kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Larantuka, Juli 2021
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur



Apolonia Corebima, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196907181997032002